



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 4 No. 1, 2026, E-ISSN : 3046 - 5729

Transformasi Politik Islam Di Turki Pada Era Erdogan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Gilang Maulana Amriza Nasution¹, Mustofa Al Ghifari², Rafif Putera Ananda³, Ihsan Maulana Syahputra⁴, Syabti Syahputra Pohan⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: gilangmaulana@gmail.com¹, alghif280717@gmail.com²,

rafifputera2@gmail.com³,

ihsanmaulanasyahputra@gmail.com⁴, syabtisyahputrapohan06@gmail.com⁵

Abstract: This study examines the transformation of Islamic politics in Turkey during the leadership of Recep Tayyip Erdogan through the perspective of *fiqh siyasah*, particularly the political thought of Al-Mawardi in *Al-Abkam al-Sultaniyyah*. The research is motivated by the significant shift in Turkey's political orientation from strict secularism toward a more accommodative approach to Islamic values within a modern democratic framework. Previous studies have predominantly focused on democratization, Islamic political movements, and Turkey's foreign policy, while limited attention has been given to evaluating Erdogan's leadership using the normative framework of classical Islamic political thought. This research employs a qualitative library research method with a normative-analytical approach. Data were collected from classical and contemporary literature related to *fiqh siyasah*, Turkish political developments, and the political thought of Al-Mawardi. The findings reveal that the political transformation under Erdogan represents a hybridization between Islamic identity and modern democratic governance. From the perspective of *fiqh siyasah*, Erdogan's leadership demonstrates conformity with the principles of

al-kifayah (leadership capacity), *hifz al-din* (protection of religion), and *maslahah* (public welfare), particularly through political stability, economic development, and the strengthening of religious identity in the public sphere. However, challenges remain regarding the implementation of *al-'adalah* (justice), especially in relation to civil liberties, political opposition, and the concentration of executive power following the 2017 constitutional referendum. Furthermore, the analysis based on *maqāṣid al-syarī'ah* indicates that political legitimacy in Islam should not merely be assessed through symbolic religious policies but also through the realization of justice, public welfare, and the protection of fundamental rights. Therefore, the Turkish experience under Erdogan illustrates an adaptive reinterpretation of classical Islamic political principles within the realities of a modern nation-state.

Keywords: Islamic Politics, Recep Tayyip Erdogan, Turkey, *Fiqh Siyasah*, Al Mawardi, Political Leadership.

Pendahuluan

Perkembangan politik global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya dinamika yang kompleks dalam hubungan antara agama dan negara, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Salah satu contoh yang paling menarik untuk dikaji adalah transformasi politik yang terjadi di Turki, sebuah negara yang secara historis dikenal sebagai representasi dari sistem sekularisme yang kuat. Sekularisme tersebut mulai dibangun sejak masa Mustafa Kemal Atatürk, yang secara tegas memisahkan agama dari urusan negara sebagai bagian dari upaya modernisasi dan westernisasi¹. Namun, dalam perkembangannya, orientasi politik Turki mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam hal relasi antara agama dan kekuasaan.

Transformasi tersebut semakin menguat pada era kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan, yang membawa arah baru dalam kebijakan politik negara. Di bawah kepemimpinannya, Turki tidak lagi sepenuhnya mempertahankan sekularisme yang kaku, melainkan mulai menunjukkan kecenderungan untuk mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan publik. Kebijakan-kebijakan yang diambil mencerminkan adanya upaya untuk mengintegrasikan identitas keagamaan ke dalam sistem politik modern. Fenomena ini kemudian memunculkan berbagai pandangan,

¹ Mustafa Kemal Atatürk, *Six Arrows of Kemalism and the Foundations of Turkish Secularism*, dalam Erik J. Zürcher, Turkey: *A Modern History* (London: I.B. Tauris, 2004).

baik yang melihatnya sebagai kebangkitan politik Islam, maupun sebagai bentuk adaptasi strategis dalam sistem demokrasi kontemporer.²

Dalam perspektif keilmuan Islam, khususnya fiqh siyasah, hubungan antara agama dan negara telah lama menjadi kajian utama para pemikir Muslim. Fiqh siyasah memuat prinsip-prinsip dasar mengenai kepemimpinan (imamah), keadilan ('adl), serta kemaslahatan umum (maslahah) sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat dijadikan sebagai alat analisis dalam memahami praktik politik di berbagai konteks, termasuk dalam dinamika politik modern seperti yang terjadi di Turki.³ Oleh karena itu, penggunaan perspektif fiqh siyasah dalam menganalisis transformasi politik Turki menjadi penting untuk melihat sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan nilai-nilai dasar dalam Islam.

Kajian mengenai transformasi politik Islam di Turki telah banyak dilakukan oleh para sarjana. Hakan Yavuz menjelaskan bahwa kemunculan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) merepresentasikan sintesis baru antara identitas Islam dan demokrasi modern yang berkembang dalam sistem politik Turki pasca-sekularisme Kemalis.⁴ Sementara itu, Feroz Ahmad menilai bahwa perubahan politik di Turki merupakan bagian dari proses panjang modernisasi negara yang tidak dapat dipisahkan dari warisan reformasi Mustafa Kemal Atatürk.⁵ Di sisi lain, Kemal Kirişçi lebih menekankan dampak transformasi politik Erdogan terhadap orientasi kebijakan luar negeri Turki dan posisinya dalam percaturan politik kawasan Timur Tengah.⁶

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak menyoroti aspek demokratisasi, hubungan sipil-militer, kebijakan luar negeri, dan perkembangan Islam politik dalam konteks politik praktis. Kajian yang secara khusus menganalisis kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan berdasarkan parameter normatif fiqh siyasah klasik, khususnya

² M. Hakan Yavuz, *Islamic Political Identity in Turkey* (New York: Oxford University Press, 2003).

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damascus: Dar al-Fikr, 1985).

⁴ M. Hakan Yavuz, *Islamic Political Identity in Turkey* (New York: Oxford University Press, 2003), h. 25–47.

⁵ Feroz Ahmad, *The Making of Modern Turkey* (London: Routledge, 1993), h. 76–105.

⁶ Kemal Kirişçi, "Turkey's Role in the Middle East," *International Affairs* 87, no. 3 (2011): 639–650.

pemikiran Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, masih relatif terbatas.⁷

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa analisis terhadap transformasi politik Islam di Turki melalui perspektif fiqh siyasah Al-Mawardi dengan menitikberatkan pada konsep imamah, al-'adalah, maslahah, dan ahl al-hall wa al-'aqd sebagai instrumen evaluasi terhadap legitimasi dan praktik kekuasaan Erdogan dalam negara modern yang tetap berlandaskan sistem demokrasi konstitusional.⁸

Berangkat dari fenomena tersebut, muncul beberapa pertanyaan mendasar yang menjadi fokus kajian ini, yaitu bagaimana bentuk transformasi politik Islam di Turki pada era kepemimpinan Erdogan, serta bagaimana transformasi tersebut dapat dianalisis dalam perspektif fiqh siyasah. Selain itu, penting pula untuk mengkaji sejauh mana kebijakan dan praktik politik yang dijalankan mencerminkan prinsip-prinsip dasar fiqh siyasah, seperti kepemimpinan yang adil, orientasi pada kemaslahatan umat, serta keseimbangan antara nilai agama dan sistem politik modern.

Sejalan dengan rumusan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi politik Islam di Turki pada era Erdogan dengan menggunakan perspektif fiqh siyasah sebagai kerangka analisis utama. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kesesuaian maupun perbedaan antara praktik politik kontemporer di Turki dengan prinsip-prinsip dasar fiqh siyasah. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi politik Islam kontemporer, serta memperkaya pemahaman mengenai relevansi fiqh siyasah dalam menghadapi dinamika politik modern yang terus berkembang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang

⁷ John L. Esposito, *Islam and Politics* (New York: Syracuse University Press, 1998), h. 215–223.

⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 15–25.

dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan objek kajian⁹. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep dan teori, khususnya yang berkaitan dengan fiqh siyasah serta dinamika politik Islam di Turki pada era Recep Tayyip Erdogan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami fenomena transformasi politik tidak hanya sebagai peristiwa empiris, tetapi juga sebagai konstruksi pemikiran yang dapat dianalisis secara normatif.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fenomena yang diteliti, kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori yang relevan¹⁰. Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan perkembangan politik Turki, khususnya perubahan orientasi dari sekularisme menuju pendekatan yang lebih akomodatif terhadap nilai-nilai Islam, serta menganalisisnya dalam perspektif fiqh siyasah. Pendekatan normatif digunakan untuk menilai kesesuaian antara praktik politik yang terjadi dengan prinsip-prinsip dasar dalam fiqh siyasah, seperti kepemimpinan (imamah), keadilan ('adl), dan kemaslahatan (maslahah).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji sumber-sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah isi dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan untuk kemudian diinterpretasikan sesuai dengan kerangka fiqh siyasah.

Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai transformasi politik Islam di Turki serta relevansinya dalam perspektif fiqh siyasah, baik dari sisi konseptual maupun praktiknya dalam konteks politik modern.

Kerangka Teori

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang penting dalam kajian hukum Islam yang secara khusus membahas tentang tata kelola

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

pemerintahan, kekuasaan, dan hubungan antara pemimpin dengan masyarakat dalam perspektif syariat¹¹. Secara konseptual, fiqh siyasah tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum, tetapi juga mencakup dimensi etika dan tujuan dari penyelenggaraan kekuasaan. Dalam tradisi pemikiran Islam klasik, fiqh siyasah berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengatur kehidupan bernegara agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Oleh karena itu, kajian ini memiliki relevansi yang kuat dalam menganalisis praktik politik, baik dalam konteks historis maupun kontemporer.

Dalam kerangka fiqh siyasah, konsep kepemimpinan atau imamah menjadi salah satu pilar utama. Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai otoritas politik semata, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola pemerintahan, menjaga stabilitas sosial, serta menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Para ulama klasik seperti Al-Mawardi menekankan bahwa kepemimpinan harus didasarkan pada prinsip keadilan, kapasitas, serta komitmen terhadap nilai-nilai agama¹². Dengan demikian, legitimasi seorang pemimpin tidak hanya berasal dari dukungan politik, tetapi juga dari kemampuannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi umat.

Selain konsep kepemimpinan, fiqh siyasah juga menempatkan masalah sebagai tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan. Masalah merujuk pada segala bentuk kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakat luas. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun keamanan. Pemikiran tentang masalah banyak dikembangkan oleh para ulama, termasuk Al-Ghazali, yang menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima prinsip dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta¹³. Oleh karena itu, kebijakan politik dapat dinilai berdasarkan sejauh mana ia mampu melindungi dan memelihara prinsip-prinsip tersebut.

Konsep lain yang tidak kalah penting dalam fiqh siyasah adalah keadilan ('adl). Keadilan dipandang sebagai fondasi utama dalam

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

¹² Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.).

¹³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993).

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tanpa adanya keadilan, kekuasaan berpotensi menjadi alat penindasan yang merugikan masyarakat. Dalam perspektif ini, seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk adil dalam membuat kebijakan, tetapi juga dalam pelaksanaannya. Keadilan mencakup perlakuan yang setara di hadapan hukum, distribusi sumber daya yang proporsional, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat¹⁴. Oleh karena itu, keadilan menjadi indikator penting dalam menilai legitimasi dan keberhasilan suatu pemerintahan.

Lebih lanjut, fiqh siyasah juga mengenal konsep siyasah syar'iyah, yaitu kebijakan yang diambil oleh penguasa untuk mengatur masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang fleksibilitas dalam praktik politik, sehingga memungkinkan adanya adaptasi terhadap perubahan zaman dan kondisi sosial. Dalam hal ini, pemikiran Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa kebijakan politik tidak harus selalu merujuk secara tekstual pada nash, tetapi dapat didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan selama tetap berada dalam koridor syariat¹⁵. Dengan demikian, fiqh siyasah tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap dinamika kehidupan masyarakat.

Dalam konteks politik modern, penerapan prinsip-prinsip fiqh siyasah menghadapi tantangan yang cukup kompleks, terutama dalam sistem negara yang mengadopsi demokrasi. Sistem demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, sementara dalam perspektif fiqh siyasah, kedaulatan tetap berada dalam kerangka nilai-nilai ilahiah. Meskipun demikian, keduanya tidak selalu bertentangan, karena terdapat titik temu dalam aspek partisipasi publik, akuntabilitas, dan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik politik kontemporer, seperti yang terjadi di Turki, perlu dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif agar dapat memahami bagaimana nilai-nilai fiqh siyasah diimplementasikan dalam sistem politik modern.

Dengan demikian, kerangka teori fiqh siyasah dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis untuk menilai transformasi politik Islam di Turki pada era Recep Tayyip Erdogan. Konsep-konsep utama seperti kepemimpinan (imamah), kemaslahatan (maslahah), keadilan ('adl), dan

¹⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1997).

¹⁵ Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah al-Shar'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998).

kebijakan berbasis syariat (siyasah syar'iyah) menjadi indikator dalam mengkaji sejauh mana praktik politik yang terjadi mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam fiqh siyasah¹⁶. Dengan menggunakan kerangka ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih mendalam dan sistematis terhadap dinamika politik Islam dalam konteks negara modern.

Pembahasan

Transformasi Politik Turki pada Era Erdogan

Perubahan arah politik di Turki pada era kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan menunjukkan dinamika yang signifikan dalam relasi antara negara dan agama. Sejak awal berdirinya republik, Turki dikenal sebagai negara yang mengadopsi prinsip sekularisme secara ketat, di mana agama ditempatkan di luar ranah politik dan pemerintahan. Namun, sejak Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) memperoleh kekuasaan pada awal abad ke-21, terjadi pergeseran orientasi politik yang mengarah pada penguatan identitas keislaman dalam kehidupan publik. Pergeseran ini tidak berlangsung secara revolusioner, melainkan melalui proses bertahap yang tetap mempertahankan kerangka formal negara sekuler.¹⁷

Dalam praktiknya, transformasi tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan dan simbol politik yang dihadirkan oleh pemerintahan Erdogan. Negara mulai memberikan ruang yang lebih luas terhadap ekspresi keagamaan, seperti pelonggaran aturan penggunaan simbol-simbol Islam di institusi publik serta peningkatan peran lembaga keagamaan dalam kehidupan sosial. Selain itu, retorika politik yang digunakan oleh Erdogan juga kerap mengandung narasi religius yang menekankan nilai-nilai moral dan identitas keislaman sebagai bagian dari legitimasi kepemimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak lagi sepenuhnya dipinggirkan, melainkan diintegrasikan secara selektif dalam praktik politik kontemporer.¹⁸

¹⁶ Abdul Rashid Moten, *Political Science: An Islamic Perspective* (New York: Palgrave Macmillan, 1996).

¹⁷ Feroz Ahmad, *The Making of Modern Turkey*, (London: Routledge, 1993).

¹⁸ Hakan Yavuz, *Secularism and Muslim Democracy in Turkey*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

Meskipun demikian, transformasi politik tersebut tidak serta-merta mengubah Turki menjadi negara berbasis agama. Struktur kelembagaan negara tetap mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi, sistem hukum positif, serta mekanisme politik modern yang bersumber dari tradisi Barat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perubahan yang terjadi lebih tepat dikategorikan sebagai proses adaptasi dan hibridisasi antara nilai-nilai Islam dengan sistem sekuler, bukan sebagai bentuk Islamisasi yang total¹⁹. Dalam konteks ini, kepemimpinan Erdogan merepresentasikan model politik yang berupaya mengakomodasi identitas keagamaan tanpa sepenuhnya meninggalkan fondasi negara modern.

Lebih lanjut, transformasi politik di Turki juga memiliki implikasi yang luas, baik dalam skala domestik maupun internasional. Di tingkat domestik, perubahan ini memengaruhi pola hubungan antara negara dan masyarakat, khususnya dalam hal legitimasi kekuasaan dan representasi identitas keagamaan. Sementara itu, di tingkat global, Turki di bawah kepemimpinan Erdogan berupaya menampilkan diri sebagai kekuatan yang memiliki kedekatan dengan dunia Islam, sekaligus tetap berperan dalam sistem internasional modern.²⁰ Oleh karena itu, transformasi politik yang terjadi tidak hanya mencerminkan perubahan internal, tetapi juga menunjukkan upaya redefinisi posisi Turki dalam percaturan politik global.

Reformasi Sistem Presidensial dan Konsolidasi Kekuasaan

Salah satu transformasi politik yang paling signifikan pada era Recep Tayyip Erdogan adalah perubahan sistem pemerintahan dari parlementer menuju sistem presidensial melalui referendum konstitusi tahun 2017. Reformasi tersebut memperluas kewenangan presiden dalam pengangkatan pejabat tinggi negara, pembentukan kabinet, serta pengambilan keputusan strategis pemerintahan. Pendukung reformasi berpendapat bahwa perubahan tersebut diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan pasca percobaan kudeta tahun 2016.²¹

¹⁹ William Hale, *Turkish Politics and the Military*, (London: Routledge, 2013).

²⁰ Kemal Kirişçi, "Turkey's Role in the Middle East," *International Affairs*, Vol. 87, No. 3 (2011).

²¹ Berk Esen and Sebnem Gumuscu, "Rising Competitive Authoritarianism in Turkey," *Third World Quarterly* 37, no. 9 (2016): 1581–1606.

Dalam perspektif fiqh siyasah Al-Mawardi, penguatan otoritas pemimpin dapat dibenarkan selama bertujuan menjaga stabilitas negara dan mewujudkan kemaslahatan umum (*masalahah 'ammah*).²² Akan tetapi, Al-Mawardi juga menegaskan pentingnya keberadaan mekanisme kontrol terhadap pemegang kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat.²³ Oleh karena itu, konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar pada lembaga eksekutif berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan prinsip akuntabilitas politik.

Dengan demikian, reformasi sistem presidensial di Turki menunjukkan adanya upaya konsolidasi kekuasaan yang dapat dipahami sebagai strategi menjaga stabilitas politik nasional. Namun dalam perspektif fiqh siyasah, efektivitas pemerintahan harus tetap diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat demi menjaga prinsip keadilan dan amanah dalam penyelenggaraan kekuasaan.²⁴

Analisis Kesesuaian Kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan dengan Konsep Fiqh Siyasah

Transformasi politik yang terjadi di Turki pada masa kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan dapat dianalisis secara lebih mendalam melalui perspektif fiqh siyasah, khususnya dengan merujuk pada pemikiran Al-Mawardi dalam karya monumentalnya *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. Dalam kerangka fiqh siyasah, kepemimpinan (imamah) dipandang sebagai institusi yang memiliki fungsi sentral dalam menjaga agama (*hifz al-din*) dan mengatur urusan dunia (*siyasah al-dunya*). Konsep ini menekankan bahwa legitimasi kekuasaan tidak semata-mata bersumber dari prosedur politik, tetapi juga dari kemampuan pemimpin dalam menegakkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan stabilitas sosial.²⁵

Jika ditinjau dari konsep tersebut, kepemimpinan Erdogan menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan dimensi religius dalam praktik politik modern. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan simbol

²² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, h. 27–31.

²³ *Ibid.*, h. 35-39

²⁴ Abdul Rashid Moten, *Political Science: An Islamic Perspective* (New York: Palgrave Macmillan, 1996), 119–126.

²⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.).

dan narasi keagamaan sebagai bagian dari legitimasi kekuasaan, yang dalam perspektif Al-Mawardi dapat dikaitkan dengan fungsi pemimpin sebagai penjaga agama. Namun demikian, implementasi konsep ini tidak sepenuhnya bersifat normatif sebagaimana dirumuskan dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyyah, mengingat sistem politik Turki tetap berlandaskan pada demokrasi dan konstitusi sekuler. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara model kepemimpinan ideal dalam fiqh siyasah dengan praktik politik yang berkembang di Turki.²⁶

Lebih lanjut, Al-Mawardi juga menekankan pentingnya prinsip keadilan (al-'adl) dan amanah dalam menjalankan kekuasaan. Dalam konteks ini, kebijakan politik Erdogan dapat dianalisis berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebijakan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dapat dipandang sebagai upaya memenuhi aspek kemaslahatan umum (maslahah), yang merupakan salah satu tujuan utama dalam fiqh siyasah²⁷. Namun, di sisi lain, kritik terhadap kecenderungan sentralisasi kekuasaan juga menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan, yang dalam perspektif fiqh siyasah dapat menjadi perhatian serius.

Selain itu, konsep ahl al-hall wa al-'aqd yang dikemukakan oleh Al-Mawardi juga relevan dalam menganalisis sistem politik Turki. Konsep ini merujuk pada kelompok elit atau otoritas yang memiliki peran dalam menentukan dan mengawasi kepemimpinan. Dalam sistem demokrasi modern, konsep ini dapat dianalogikan dengan lembaga legislatif, partai politik, serta mekanisme pemilu yang berfungsi sebagai sarana legitimasi kekuasaan²⁸. Dalam konteks Turki, mekanisme demokrasi tetap berjalan, namun dinamika politik yang berkembang menunjukkan adanya dominasi kekuatan eksekutif yang cukup kuat. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam implementasi konsep pengawasan kekuasaan antara teori klasik fiqh siyasah dan praktik politik kontemporer.

Dengan demikian, analisis terhadap transformasi politik Turki dalam perspektif fiqh siyasah menunjukkan bahwa praktik politik pada era

²⁶ akan Yavuz, *Secularism and Muslim Democracy in Turkey*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

²⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Shorouk, 1997).

²⁸ John L. Esposito, *Islam and Politics*, (New York: Syracuse University Press, 1998).

Erdogan tidak sepenuhnya mencerminkan konsep ideal yang dirumuskan dalam *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, tetapi juga tidak sepenuhnya bertentangan. Sebaliknya, yang terjadi adalah proses adaptasi dan reinterpretasi nilai-nilai politik Islam dalam kerangka negara modern yang sekuler. Kondisi ini mengindikasikan bahwa politik Islam dalam konteks kontemporer tidak selalu hadir dalam bentuk formal yang kaku, melainkan dapat bertransformasi sesuai dengan konteks sosial, politik, dan historis yang melingkupinya.

Analisis Normatif Kesesuaian Kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan dalam Perspektif Fiqh Siyasah Al-Mawardi

Dalam perspektif fiqh siyasah, pemikiran Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* memberikan parameter normatif yang jelas mengenai idealitas kepemimpinan politik. Konsep imamah yang ia rumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan religius. Oleh karena itu, kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan perlu dianalisis secara kritis dengan menempatkannya dalam kerangka normatif tersebut, bukan sekadar dalam konteks politik modern.²⁹

Pertama, dalam aspek kapasitas kepemimpinan (*al-kifayah*), Erdogan dapat dinilai memenuhi kriteria yang dirumuskan Al-Mawardi. Keberhasilannya dalam memperkuat posisi eksekutif serta menjaga stabilitas politik menunjukkan adanya kemampuan dalam mengelola negara secara efektif. Transformasi sistem politik di Turki menuju sistem presidensial mencerminkan orientasi pada efisiensi kekuasaan. Dalam kerangka Al-Mawardi, hal ini dapat dibenarkan selama bertujuan untuk menjaga keteraturan dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, dari sisi kapasitas administratif, terdapat kesesuaian antara praktik kepemimpinan Erdogan dan prinsip *kifayah*.

Namun, kesesuaian tersebut tidak sepenuhnya berlaku dalam aspek keadilan (*al-'adalah*). Al-Mawardi menempatkan keadilan sebagai syarat fundamental yang menentukan legitimasi seorang pemimpin. Dalam praktiknya, dinamika politik pasca Kudeta Turki 2016 menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan kekuasaan secara represif terhadap oposisi. Pembatasan kebebasan sipil dan kontrol terhadap media menjadi indikator bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud secara ideal.

²⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.).

Dalam perspektif fiqh siyasah, kondisi ini berpotensi mengarah pada *ta'assuf fi al-sulthah* (penyalahgunaan kekuasaan), yang bertentangan dengan prinsip dasar kepemimpinan Islam.

Selanjutnya, dalam aspek perlindungan agama (*hifz al-din*), Erdogan menunjukkan kecenderungan yang sejalan dengan gagasan Al-Mawardi. Kebijakan yang berkaitan dengan simbol dan identitas Islam, seperti perubahan status Hagia Sophia, dapat dimaknai sebagai upaya mengembalikan peran agama dalam ruang publik. Dalam kerangka normatif, langkah ini mencerminkan tanggung jawab pemimpin dalam menjaga eksistensi nilai-nilai keagamaan. Akan tetapi, jika ditinjau lebih dalam, muncul pertanyaan apakah kebijakan tersebut bersifat substantif atau sekadar simbolik, sehingga efektivitasnya dalam mewujudkan masalah masih perlu diperdebatkan.

Lebih lanjut, Al-Mawardi menekankan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak hanya bersumber dari pengakuan formal, tetapi juga dari komitmen terhadap kemaslahatan umum (*masalah 'ammah*). Dalam sistem demokrasi modern, legitimasi Erdogan diperoleh melalui mekanisme elektoral yang berulang. Namun, dalam perspektif fiqh siyasah, kemenangan politik tidak secara otomatis mencerminkan legitimasi normatif. Legitimasi tersebut harus diiringi dengan praktik keadilan, perlindungan hak masyarakat, serta distribusi kekuasaan yang proporsional. Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara legitimasi prosedural dan legitimasi normatif dalam menilai kepemimpinan Erdogan.³⁰

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Erdogan menunjukkan pola ambivalensi dalam perspektif fiqh siyasah Al-Mawardi. Di satu sisi, terdapat kesesuaian dalam aspek kapasitas kepemimpinan dan upaya afirmasi nilai-nilai keagamaan. Namun, di sisi lain, terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi prinsip keadilan dan pengelolaan kekuasaan yang cenderung terpusat. Hal ini menegaskan bahwa penerapan konsep politik Islam klasik dalam konteks negara modern seperti Turki memerlukan reinterpretasi yang kritis, tanpa mengabaikan prinsip normatif yang menjadi fondasi utamanya.

³⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.).

Kepemimpinan Erdogan dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Selain dianalisis melalui konsep imamah Al-Mawardi, kepemimpinan Erdogan juga dapat ditinjau melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Menurut Al-Ghazali, tujuan utama syariat adalah menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).³¹ Kelima prinsip tersebut dapat digunakan sebagai instrumen normatif untuk menilai kebijakan politik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam aspek *hifz al-din*, sejumlah kebijakan Erdogan menunjukkan kecenderungan memperkuat identitas Islam dalam ruang publik, termasuk peningkatan peran lembaga keagamaan dan perubahan status Hagia Sophia menjadi masjid pada tahun 2020.³² Kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk afirmasi terhadap identitas keagamaan masyarakat Muslim Turki. Namun demikian, implementasi prinsip *hifz al-din* tidak hanya berkaitan dengan simbol keagamaan, tetapi juga perlindungan terhadap kebebasan beragama dan penghormatan terhadap kelompok minoritas.

Dalam aspek *hifz al-mal*, keberhasilan pembangunan ekonomi pada periode awal pemerintahan AKP menunjukkan adanya upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.³³ Akan tetapi, meningkatnya inflasi dan melemahnya nilai tukar Lira Turki dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam mempertahankan kemaslahatan ekonomi secara berkelanjutan.³⁴

Dengan demikian, analisis *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak hanya diukur dari keberhasilan politik dan simbolisasi agama, tetapi juga dari kemampuan negara dalam

³¹ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h. 174–176.

³² Soner Cagaptay, *Erdogan's Empire: Turkey and the Politics of the Middle East* (London: I.B. Tauris, 2020), h. 102–105.

³³ Hakan Yavuz, *Secularism and Muslim Democracy in Turkey* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), h. 158–173.

³⁴ Ziya Öniş, "Turkey under the Challenge of State Capitalism: The Political Economy of the Late AKP Era," *Southeast European and Black Sea Studies* 19, no. 2 (2019): 201–225.

mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan perlindungan hak-hak masyarakat secara menyeluruh.³⁵

Kesimpulan

Transformasi politik Turki pada era Recep Tayyip Erdogan menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam relasi antara agama dan negara yang sebelumnya didominasi oleh paradigma sekularisme Kemalis. Perubahan tersebut tidak mengarah pada pembentukan negara agama secara formal, melainkan pada proses integrasi identitas Islam ke dalam sistem demokrasi modern melalui berbagai kebijakan politik, sosial, dan kultural. Dalam konteks ini, Erdogan berhasil membangun model politik yang memadukan legitimasi demokratis dengan simbol dan nilai-nilai keislaman yang semakin memperoleh ruang dalam kehidupan publik Turki.

Berdasarkan perspektif *fiqh siyasah* Al-Mawardi, kepemimpinan Erdogan menunjukkan kesesuaian pada beberapa aspek fundamental. Dalam dimensi *al-kifayah*, Erdogan dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat dalam menjaga stabilitas politik dan memperkuat posisi negara di tingkat nasional maupun internasional. Dalam aspek *hifz al-din*, berbagai kebijakan yang memberikan ruang lebih luas bagi ekspresi keagamaan dapat dipahami sebagai bentuk afirmasi terhadap identitas Islam di ruang publik. Selain itu, sejumlah kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial juga mencerminkan orientasi terhadap kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) yang merupakan tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut *fiqh siyasah*.

Namun demikian, analisis normatif menunjukkan bahwa implementasi prinsip *al-'adalah* belum sepenuhnya terealisasi secara ideal. Reformasi sistem presidensial pasca referendum konstitusi tahun 2017 telah memperkuat efektivitas pemerintahan, tetapi sekaligus memunculkan kritik mengenai meningkatnya konsentrasi kekuasaan eksekutif. Dalam perspektif Al-Mawardi, efektivitas pemerintahan harus tetap diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antara otoritas

³⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 45–56.

dan akuntabilitas. Oleh karena itu, legitimasi kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan politik dan dukungan elektoral, tetapi juga oleh konsistensi dalam menegakkan keadilan serta melindungi hak-hak masyarakat.

Analisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* semakin menegaskan bahwa keberhasilan politik Islam tidak cukup diukur melalui simbolisasi agama atau penguatan identitas keislaman semata. Legitimasi politik yang sesuai dengan tujuan syariat harus diwujudkan melalui perlindungan agama, kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, kebebasan sipil, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, kepemimpinan Erdogan dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi dan reinterpretasi nilai-nilai politik Islam klasik dalam konteks negara modern yang demokratis, di mana terdapat kesesuaian sekaligus ketegangan antara idealitas normatif *fiqh siyasah* dan realitas politik kontemporer.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Al-Mawardi tetap memiliki relevansi sebagai instrumen normatif untuk mengevaluasi praktik kekuasaan modern. Namun, penerapannya memerlukan pendekatan yang kontekstual dan kritis agar mampu menjawab kompleksitas sistem politik kontemporer. Oleh karena itu, transformasi politik Turki pada era Erdogan memberikan pelajaran penting bahwa hubungan antara Islam dan negara tidak selalu diwujudkan dalam bentuk formalistik, melainkan dapat hadir melalui proses adaptasi, negosiasi, dan reinterpretasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan modern.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Feroz. *The Making of Modern Turkey*. London: Routledge, 1993.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Atatürk, Mustafa Kemal. "Six Arrows of Kemalism and the Foundations of Turkish Secularism." In *Turkey: A Modern History*, edited by Erik J. Zürcher. London: I.B. Tauris, 2004.

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Cagaptay, Soner. *Erdogan's Empire: Turkey and the Politics of the Middle East*. London: I.B. Tauris, 2020.
- Esen, Berk, and Sebnem Gumuscu. "Rising Competitive Authoritarianism in Turkey." *Third World Quarterly* 37, no. 9 (2016): 1581–1606.
- Esposito, John L. *Islam and Politics*. 4th ed. New York: Syracuse University Press, 1998.
- Hale, William. *Turkish Politics and the Military*. London: Routledge, 2013.
- Ibn Taymiyyah. *Al-Siyasah al-Shar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kirişci, Kemal. "Turkey's Role in the Middle East." *International Affairs* 87, no. 3 (2011): 639–650.
- Mardin, Şerif. *Religion and Social Change in Modern Turkey: The Case of Bediuzzaman Said Nursi*. Albany: State University of New York Press, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Moten, Abdul Rashid. *Political Science: An Islamic Perspective*. New York: Palgrave Macmillan, 1996.
- Öniş, Ziya. "Turkey under the Challenge of State Capitalism: The Political Economy of the Late AKP Era." *Southeast European and Black Sea Studies* 19, no. 2 (2019): 201–225.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. Cairo: Dar al-Shorouk, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Yavuz, M. Hakan. *Islamic Political Identity in Turkey*. New York: Oxford University Press, 2003.

Yavuz, M. Hakan. *Secularism and Muslim Democracy in Turkey*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Zürcher, Erik J. *Turkey: A Modern History*. 3rd ed. London: I.B. Tauris, 2004.

Zuhaili, Wahbah al-. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr, 1985.